

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN INTENSITAS
PERSEDIAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2013-2016)

Oleh :
Fatma Mundriasari
Pembimbing : **Zirman dan Elfi Ilham**

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : Mundriasarifatma@gmail.com

*The Influence Of Corporate Governance, Leverage And Inventory Intensity To Tax
Avoidance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of corporate governance, leverage, inventory intensity to tax avoidance. Dependent variable in this research is tax avoidance as measured by cash effective tax rate. The independent variables used in this study are corporate governance proxied by board of commissioners, independent commissioners, audit committees, compensation of commissioners and board of directors, institutional investors. Then other independent variables in this research are leverage and inventory intensity. The sample of this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2013-2014. The sample was collected by purposive sampling method and produced 40 companies as sample. Data analysis using classic assumption test, hypothesis determination with multiple linear regression test, and determination test of R². The result of this research indicates that variable of board of commissioner, independent commissioner, compensation of board of commissioner and board of directors, leverage have influence to tax avoidance. While the audit committee variables, institutional investors, and inventory intensity show the result that the variable has no effect on tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Board of Commissioners, Independent Commissioner, Audit Committee, Compensation of Commissioners and Board of Directors, Institutional Investors, Leverage, Inventory Intensity.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan Negara yang digunakan untuk menunjang perekonomian pemerintah yang kemudian dana tersebut digunakan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia bahkan diberbagai negara, pajak juga dijadikan sebagai sumber penerimaan yang

digunakan untuk memenuhi kegiatan perekonomian mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Upaya yang dilakukan wajib pajak dalam memperkecil beban pajaknya adalah dengan melakukan manajemen pajak. Oleh sebab itulah, strategi dibidang perpajakan sebaiknya disebut dengan istilah Manajemen Pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Reza, 2012).

Tax avoidance dilakukan untuk berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya untuk meminimalkan beban dan pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Semakin cepatnya pertumbuhan suatu negara maka akan banyak pula perusahaan atau badan usaha asing yang melakukan investasi pada negara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal (Marfirah dan Fazli, 2016). Metode dan teknik yang dilakukan dalam *tax avoidance* (penghindaran pajak) ini yaitu memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23).

Beberapa kasus korupsi terkait pajak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014 PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak,

bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar (<http://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca.Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>).

Pada kasus lainnya terdapat juga kasus yang melibatkan pajak didalamnya yaitu IKEA. IKEA dituduh menghindari pajak hingga 1 triliun euro atau setara dengan Rp 14.900 triliun dalam rentang waktu antara 2009 hingga 2014. IKEA diduga memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda sehingga terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Untuk tahun 2014, penghindaran pajak yang dilakukan Ikea di Jerman mencapai 35 juta euro atau sekitar Rp 523 miliar, 24 juta euro atau ekuivalen Rp 359 miliar di Perancis, dan 11,6 juta euro atau lebih dari Rp 173 miliar di Inggris. Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara 7,5 juta euro atau Rp 112 miliar hingga 10 juta euro atau Rp 149 miliar (<http://properti.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak.Hingga.Rp.14.900.Triliun>).

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum *corporate governance*, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Dewan

komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007). Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. (Sutedi 2011:153).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengenai Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit. Komite audit merupakan salah satu bagian dari *corporate governance* yang akan membantu kinerja dan memberikan pengawasan yang baik bagi perusahaan.

Kompensasi merupakan insentif atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada pengelola perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan pengelola perusahaan tersebut seperti berupa gaji, tunjangan dan lainnya. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan (Bernad dalam Meilinda dan Nur 2013).

Investor institusional dapat dikatakan sebagai manajemen eksternal perusahaan karena mereka berasal dari luar perusahaan. Lembaga tersebut bisa berupa perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan *asset management*. (Brancato & Gaughan, 1991 dalam Hanum dan Zulaikha 2013).

Leverage menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan

perusahaan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* dihitung berdasarkan dengan total hutang perusahaan dibagi dengan total ekuitas (Cahyono dkk, 2016).

Penilaian persediaan yang diatur dalam perpajakan berbeda dengan yang diatur PSAK No. 14 (revisi 2008). Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK no.14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi, dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan Imelia dkk (2015).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Nur (2013), Marfirah dan Fazli (2016) dan Cahyono dkk. Pada penelitian ini akan menguji pengaruh *corporate governance* (jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, komite audit, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, dan investor institusional), *leverage* dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1)Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?(2)Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?(3)Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?(4)Apakah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi

berpengaruh terhadap *tax avoidance*?(5)Apakah investor institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?(6)Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?(7)Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?. Penelitian ini dilaklkan dengan tujuan (1)Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap *tax avoidance*(2)Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* (3)Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*(4)Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap *tax avoidance*(5)Untuk mengetahui pengaruh investor institusional terhadap *tax avoidance*(6)Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* (7)Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Pajak

Tax management adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis , sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013: 13). Hutagaol menyebutkan bahwa manajemen perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Pohan,2013:17).

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pada dasarnya mengasumsikan bahwa setiap individu

bertindak untuk kepentingan pribadi. Pemilik hanya tertarik dengan hasil investasi mereka dalam perusahaan. Sedangkan agen diberikan kompensasi yang cukup tinggi atas imbalan jasa yang profesional mereka, karena perbedaan kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan pribadi. Para pemilik menginginkan pengembalian yang besar dan cepat atas investasi yang mereka lakukan. Salah satunya dicerminkan dengan kenaikan deviden atas saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang telah dicapai. Seringkali pemilik menilai kinerja agen berdasarkan atas laba yang dihasilkan perusahaan sehingga alokasi untuk deviden pun akan semakin besar. Dalam hal ini, agen dianggap telah berkinerja baik dan layak mendapatkan insentif yang tinggi (Irawan dan Aria, 2012).

Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yanag digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan,2013:14).

Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa

tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Jumlah Dewan Komisaris

Menurut UU 35 Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kemudian dalam PERMEN No. Per 10.MBU/2012 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan perseroan (persero) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Jadi dapat dikatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang berfungsi dalam monitoring kinerja manajemen, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 108 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi.

Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan

pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai.

Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi

Kompensasi perusahaan pada umumnya diukur dengan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan. Kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan akan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan. Untuk mengukur kompensasi manajemen, penelitian ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Armstrong et al. (2012) menggunakan nilai total kompensasi yang diterima selama setahun oleh eksekutif perusahaan. Data nilai total kompensasi manajemen yang diterima selama setahun, terdapat dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Perusahaan (Fahreza, 2014).

Investor Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain kecuali kepemilikan individu investor (Khurana dan Mosser, 2009). Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*.

Leverage

Leverage seperti yang dikemukakan oleh Kasmir (2012) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besar jumlah utang yang digunakan

perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan modal sendiri.

Intensitas Persediaan

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, persediaan merupakan salah satu aset penting perusahaan karena berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. *Inventory intensity* atau intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aset yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance

Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang sangat signifikan dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Keberadaan dan karakteristik perusahaan sebagai salah satu motor penggerak *corporate governance* akan menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

H1: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka

semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan.

H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor, dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

H3: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi terhadap Tax Avoidance

Pemberian kompensasi diharapkan mampu mengatasi *agency conflict* yang ada. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang (Meilinda dan Nur, 2013). Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari diberikannya kompensasi yaitu untuk

meningkatkan kinerja yang baik dari pihak-pihak pengelola perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dan mengharapkan adanya kontribusi positif dari kinerja yang baik tersebut yaitu dalam mengelola pajak perusahaan, dimana dalam mengelola pajak tersebut principal sangat mengharapkan adanya manajemen pajak yang dilakukan dengan baik sehingga dapat menekan beban pajak serendah mungkin dan hal tersebut akan berdampak pada laba setelah pajak yang diperoleh dari perusahaan. Kompensasi bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.
H4: kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Investor Institusional terhadap Tax Avoidance

Tingkat kendali dan pengawasan yang tinggi dari investor institusional merupakan mekanisme *good corporate governance* yang akan memberikan aspek positif dari manajemen pajak perusahaan, yaitu perencanaan pajak yang lebih baik, yang kemudian mengakibatkan hutang pajak yang lebih rendah dan meningkatkan nilai perusahaan (Sabli dan Noor, 2013 dalam Zulkarnaen, 2015).

H5: Investor institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset

perusahaan. berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manager untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manager memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan (Imelia dkk, 2015).

H6: *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance

PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

H7: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yang ada dalam bagian nonprobabilitas yaitu dengan metode *purposive sampling*. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang diambil adalah 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif pada studi empiris. Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dengan tipe rasio, karena data

yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data dapat diolah dengan metode regresi berganda. Metode regresi dapat dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* yang dikeluarkan oleh *Institut for Economic and Research* melalui www.idx.co.id. Dengan demikian model yang dapat dibentuk dari variabel diatas adalah dengan model regresi berganda.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan *cash effective tax rate CETR*.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income}}$$

Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014:96). Pada bagian ini masing-masing variabel independen akan dijelaskan.

Jumlah Dewan Komisaris (X1)

Menurut Egon Zehnder (2000) dalam Meilinda dan Nur (2013), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. $\text{BOARD} = \sum \text{Seluruh anggota yang bergabung dalam Dewan Komisaris.}$

Komisaris Independen (X2)

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Variabel ini diukur dengan rumus berikut:

INDEP

$$= \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komisaris}}$$

Komite Audit (X3)

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit (Surya dan Ivan, 2008:145). Variabel ini diukur dengan:

$$\text{AUD} = \sum \text{Seluruh anggota Komite Audit}$$

Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi (X4)

Dalam penelitian ini kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi disimbolkan dengan COMP. Kompensasi dalam penelitian ini merupakan total kompensasi yang

diterima oleh keseluruhan dewan komisaris dan direksi dalam bentuk apapun dibagi dengan *revenue* perusahaan. Komisaris dan direksi biasanya diberikan remunerasi berupa uang, saham, maupun stock option.

COMP=

$$\frac{\text{Total Kompensasi yang diterima Komisaris dan Direksi}}{\text{Revenue perusahaan}}$$

Investor Institusional (X5)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Investor institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Variabel investor institusional diukur dengan melihat proporsi investor institusional berdasarkan jumlah investor yang ada dalam suatu perusahaan.

INST=

$$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

Leverage (X6)

Jensen dan Meckling (1986) menunjukkan bahwa tingkat hutang yang tinggi akan mengurangi masalah keagenan. Dengan menerbitkan hutang, manajemen akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang beserta bunganya dimasa depan. Pembayaran ini tentu saja bisa dilakukan apabila kinerja perusahaan baik. Oleh karena itu, hutang dapat mengurangi masalah keagenan. Dalam penelitian ini rasio hutang disimbolkan dengan DER dimana:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total debt}}{\text{total equity}}$$

Intensitas Persediaan (X7)

Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan salah

satu komponen penyusun komposisi aset yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Variabel intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan cara:

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{total persediaan}}{\text{total aset}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Setelah itu, pengambilan sampel perusahaan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dari teknik pengambilan sampel terdapat 40 perusahaan manufaktur periode 2013-2014 yang memenuhi kriteria dari proses seleksi sampel. Dari seluruh perusahaan manufaktur yaitu 144 perusahaan terdapat 30 perusahaan yang tidak mengeluarkan *annual report* secara berturut-turut, perusahaan yang delisting sebanyak 4 perusahaan, 54 perusahaan yang mengalami kerugian, dan 16 perusahaan yang tidak menyajikan data yang lengkap selama periode penelitian 2013-2016.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	160	.00253	.98982	.2917078	.15349453
BOARD	160	3	11	4.79	1.878
INDEP	160	.20000	.75000	.4009882	.09547605
AUDIT	160	2	5	3.12	.425

COMP	160	.00095	.99078	.0709357	.16166572
INST	160	.00130	1.10842	.6517322	.25606850
DER	160	.00050	.85700	.2208763	.25395609
INPERS	160	.01198	.97394	.2179112	.14571377
Valid N (listwise)	160				

Sumber : Data Olahan, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data yang pada penelitian ini adalah sebanyak 160 sampel. Variabel dewan komisaris menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 4,79. Dengan nilai dewan komisaris tertinggi sebesar 11 sedangkan nilai dewan komisaris terendah sebesar 3. Variabel komisaris independen menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 0,40. Dengan nilai komisaris independen tertinggi sebesar 0,75 sedangkan nilai komisaris independen terendah sebesar 0,200. Variabel komite audit menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 3,12. Dengan nilai komite audit tertinggi sebesar 5 sedangkan nilai komite audit terendah sebesar 2. Variabel kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 0,0709. Dengan nilai kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi tertinggi sebesar 0,99 sedangkan nilai kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi terendah sebesar 0,00095. Variabel investor institusional menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 0,651. Dengan nilai investor institusional tertinggi sebesar 1,108 dimiliki sedangkan nilai investor institusional terendah sebesar 0,0013. Variabel *leverage* menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 0,2208. Dengan nilai *leverage* tertinggi sebesar 0,857 sedangkan nilai *leverage* terendah sebesar 0,0005. Nilai Variabel intensitas persediaan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 0,217. Dengan nilai intensitas persediaan tertinggi sebesar 0,973 sedangkan nilai intensitas persediaan terendah sebesar 0,011. *Tax avoidance* yang diukur dengan

membandingkan pajak yang dibayarkan secara kas (*cash tax paid*) dengan laba sebelum pajak (*pretax income*). Nilai rata-rata *tax avoidance* adalah sebesar 0,291. Nilai minimum *tax avoidance* sebesar 0,00253, nilai maksimum sebesar 0,989 sedangkan standar deviasi yang dimiliki *tax avoidance* sebesar 0,153.

Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14366928
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		1.445
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061

a. Test distribution is Normal.

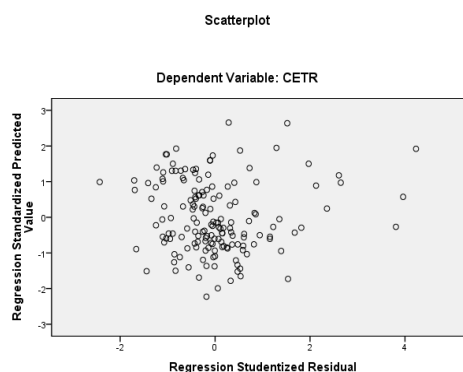
b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp.sig* $0,061 > \alpha 0.05$. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 1
Grafik hasil uji heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang teratur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Metode Uji multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *variable inflation factor* (VIF).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
BOARD	.822	1.217
INDEP	.846	1.183
AUD	.939	1.065
COMP	.824	1.213
INST	.901	1.110
DER	.959	1.043
INPERS	.852	1.174

Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance dari seluruh variabel independen lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Metode yang digunakan adalah *Durbin-Watson test*.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a				
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.352 ^a	.124	.184	.14694022	1.743

a. Predictors: (Constant), INPERS, AUDIT, INDEP, DER, INST, COMP, BOARD

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari hasil uji autokorelasi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,743. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2. Maka dapat disimpulkan bahwa uji *Durbin-Watson* terletak pada daerah yang tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Uji Linear Berganda

Metode regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian. Hasil regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y(\text{CETR}) = 0,140a + 0,015X_1 + 0,310X_2 - 0,021X_3 + 0,161X_4 + 0,049X_5 - 0,100X_6 + 0,103X_7$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.140	.105		1.333	.185
BOARD	.015	.007	.188	2.246	.026
INDEP	.310	.133	.193	2.334	.021
AUDIT	-.021	.028	-.059	-.756	.451
COMP	.161	.079	.170	2.030	.044
INST	.049	.048	.082	1.024	.307
DER	-.100	.047	-.166	-2.136	.034
INPERS	.103	.087	.097	1.184	.238

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan, 2018

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t mengenai dewan komisaris menunjukkan nilai signifikansi 0,026 yang mana hasil tersebut lebih kecil $< 0,05$, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena $t \text{ hitung } 2,246 > t \text{ tabel } 1,975$, artinya H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t mengenai komisaris independen menunjukkan nilai signifikansi 0,021 yang mana hasil tersebut lebih kecil $< 0,05$, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena $t \text{ hitung } 2,334 > t \text{ tabel } 1,975$, artinya H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t mengenai komite audit menunjukkan nilai signifikansi 0,451 yang mana hasil tersebut lebih besar $> 0,05$, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena $t \text{ hitung } -0,756 < t \text{ tabel } 1,975$, artinya H_{a3} ditolak dan H_{o3} diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hubungan negatif.

Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t mengenai kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi menunjukkan nilai signifikansi 0,044 yang mana hasil tersebut lebih kecil $< 0,05$, nilai t hitung akan

dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena $t \text{ hitung } 2,030 > t \text{ tabel } 1,975$ yang menunjukkan arah positif artinya H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hubungan negatif.

Pengaruh Investor Institusional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t mengenai Investor Institusional menunjukkan nilai signifikansi 0,307 yang mana hasil tersebut lebih besar dari $> 0,05$, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena $t \text{ hitung } 1,024 < t \text{ tabel } 1,975$ artinya H_{a5} ditolak dan H_{o5} diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t mengenai Leverage menunjukkan nilai signifikansi 0,034 yang mana hasil tersebut lebih kecil $< 0,05$, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena $t \text{ hitung } -2,136 > t \text{ tabel } 1,975$ artinya H_{a6} diterima dan H_{o6} ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t mengenai Intensitas persediaan menunjukkan nilai signifikansi 0,238 yang mana hasil tersebut lebih besar dari $> 0,05$, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena $t \text{ hitung } 1,184 < t \text{ tabel } 1,975$ artinya H_{a7} ditolak dan H_{o7} diterima. Hal tersebut

menunjukkan bahwa variabel Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil uji ini menunjukkan bahwa hasil dari uji determinasi ini adalah sebesar 0.184 yang artinya bahwa sumbangan pengaruh variabel independen *corporate governance* (dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kompensasi dewan komisaris dan direksi, investor institusional) *leverage* dan intensitas persediaan terhadap variabel dependen *tax avoidance* adalah sebesar 18,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa variabel kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) diketahui bahwa variabel investor institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) diketahui bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) diketahui bahwa variabel intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

1. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama 4 tahun yaitu pada tahun 2013-2016. Selain itu variabel yang digunakan hanya 7 variabel. Sehingga pada penelitian selanjutnya masih banyak pengaruh variabel lain diluar penelitian.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Masih banyak perusahaan lain yang bisa dijadikan sampel penelitian selanjutnya misalnya perusahaan perbankan, transportasi, telekomunikasi, pertambangan dan lain-lain.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan perusahaan selain manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan komponen *corporate governance* lainnya seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit, CSR dan komponen *corporate governance* lainnya yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Blocher EJ, Chen KH, Cokins G, Lin TW. 2007. *Manajemen Biaya*. Tim Penerjemah Penerbit

- Salemba Penerjemah, Jakarta : Salemba Empat. Terjemahan dari *Cost Management*.
- Brigham, F., Eugene dan Houston. 2010. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (edisi II). Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyono, Deddy Dyas, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), *Leverage* (Der), dan *Profitabilitas* (ROA), terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Of Accounting*, volume 2 No. 2 Maret Tahun 2016. Universitas Padjajaran.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal* volume 2, Nomor 4 Tahun 2013. Universitas Diponegoro Semarang
- Desai, Mihir A. And Dhammika Dharmapala. 2006. *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives*. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179
- Dyreg, S., Hanlon dan M., Maydew, E 2008. *Long-run corporate tax avoidance*. *Accounting Review*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawan, Hendra dan Aria Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. *"Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure"*. *Journal of Financial Economics*.
- Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir.(2012), *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Diana, R. Adri Satriawan Surya dan Supriono. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Volume 2, Nomor 2 Tahun 2015*. Universitas Riau.
- Marfirah, Dina dan Fazli Syam BZ. 2016. Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Volume1, Nomor 2, tahun 2016*. Universitas Syiah Kuala.
- Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Volume 2, No.3 Tahun 2013, ISSN (online) : 2337:3806*.
- Minnick, K., dan Noga, T. (2010). *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?*. *Journal of Corporate Finance Vol 16, No 5. 703-718*.

- Natrimon. (2017). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi-SNITek 2017, ISSN 2580-5495.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Reza, Faisal. 2012. "Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite audit terhadap Penghindaran pajak". Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Santoso, Titus Bayu dan Dul Muid. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. jurnal Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014. ISSN (online) :2337-3806.
- Sari, Gusti Maya. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Volume 2, Nomor 3 tahun 2014. Universitas Negeri Padang.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Jakarta: Alfabeta.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Winata, Fenny. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Volume 4, Nomor 1, Tahun 2014.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
<http://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca.Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>.
<http://www.kompasiana.com/ranggraini/pengertian-dan-manfaat-perencanaan-pajak>
<http://properti.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak.Hingga.Rp.14.900.Triliun>.
www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150209_hsbc_pajak
www.bpkp.go.id
www.fcgi.or.id/corporate-governance/
www.sahamok.com